Bantul Berpotensi Jadi Pusat Pisang

KR-Sukro Riyadi

Gandung melihat pisang di Plumbungan Bambanglipuro Bantul.

BANTUL (KR) - Anggota DPR RI, Drs HM Gandung Pardiman MM, meninjau lokasi budidaya pisang cavendish atau pisang ambon putih di Dusun Plumbungan Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul. Kunjungan tersebut sebagai salah satu komitmen Gandung dalam mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Sejauh ini jenis pisang itu jadi primadona masyarakat untuk dikembangkan.

Masa panen membutuhkan waktu lebih singkat dibanding jenis lainnya. Sedang terkait dengan harga relatif lebih menguntungkan petani dibanding varietas lainnya. "Mulai tanam hingga panen butuh waktu sekitar 8-9 bulan. Lebih singkat dibanding yang lain. karena ada yang berumur satu tahun baru panen," ujar Gandung Pardiman didampingi Lurah Sumbermulyo, Busra, di sela mengunjungi lokasi budidaya pisang di Dusun Plumbungan Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul, Kamis (24/8)

Dijelaskan, Kabupaten Bantul punya potensi untuk dijadikan sebagai pusat budidaya pisang cavendish. Karena masih tersedia pekarangan luas disetiap keluarga. Artinya beda harus hamparan tanah kosong agar masyarakat Bantul berdaya dengan budidaya pisang itu. Cukup memanfaatkan lahan kosong di sekitar tempat tinggal. Karena pada akhirnya nanti akan memberikan nilai tambah masukan keluarga.

"Saya punya harapan bagaimana masyarakat Bantul bisa mengembangkan komoditas pisang itu. Salah satu penguatan perekonomian masyarakat," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa bibit pisang cavendish tersebut merupakan bantuan dari Gandung Pardiman. Gandung juga berdialog dengan Kuswartini perempuan pembuat pupuk, sabun dengan metode ECO Enzyme. **(Roy)-f**

KOMISI II DPR PANTAU KESIAPAN PEMILU

Sleman Jemput Bola Pemilih Pemula

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Aula Lantai III Setda Sleman, Kamis (24/8). Kunjungan tersebut untuk mengetahui kesiapan tahapan pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Sleman.

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengungkapkan, Pemkab Sleman terus berkomitmen untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 melalui proses yang aman, jujur, adil, damai dan bermartabat. Hal ini diwujudkan melalui berbagai upaya, salah satunya dengan upaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sleman yang telah melakukan jemput bola pelayanan perekaman data e-KTP ke sekolah-sekolah.

"Saat ini ada 20.000 pemilih pemula yang tercatat di Dinas Dukcapil. Sehingga dengan upaya ini diharapkan pada saat pemilu serentak tahun 2024, mereka sudah bisa memiliki e-KTP dan bisa ikut serta dalam pesta demokrasi tahun 2024," jelasnya.

Danang juga menjelaskan, Pemkab Sleman telah melakukan sejumlah kegiatan untuk mendukung kesuksesan Pemilu 2024. Beberapa kegiatan tersebut di antaranya, sosialisasi pemilu di 17 kapanewon, pelaksanaan rakorda pemilu serentak, deklarasi kampanye damai, dan deklarasi pemilu damai. "Dengan upaya tersebut, diharapkan partisipasi pemilih dapat meningkat pada pesta demokrasi mendatang," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Komisi II DPR Syamsurizal menegaskan, kesiapan jelang pemilu serentak 2024 perlu dipastikan berjalan dengan baik. Kunjungan di Kabupaten Sleman, juga menjadi media untuk membedah kendala yang dihadapi Pemkab Sleman. Melalui sesi diskusi, diharapkan permasalahan yang menghambat proses persiapan pemilu dapat segera teratasi dengan baik.

Menanggapi upaya yang telah dilakukan Dinas Dukcapil dalam menjemput bola pendataan generasi muda, Syamsurizal mengimbau agar Pemkab Sleman dapat memberikan arahan yang tepat. Dengan informasi yang jelas dan tepat, dapat memberikan pandangan kepada pemilih pemula dalam menggunakan haknya.

"Ada 204,8 juta pemilih di seluruh Tanah Air dan 56% di antaranya adalah pemilih pemula. Kami dari Komisi II selalu mengingatkan kepada Pemerintah Daerah agar betul-betul memberikan arahan kepada anak muda kita yang baru mulai memilih," ujarnya. **(Has)-f**

DALAM APBD PERUBAHAN 2023

Alokasi JPS Perlu Ditambah Rp 2,5 M

SLEMAN (KR) - Alokasi Jaring Pengaman Sosial (JPS) perlu ditambah dalam APBD Perubahan 2023 sebesar Rp 2,5 miliar. Hal itu dikarenakan program JPS sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan kesehatan, pendidikan dan sosial dari pemerintah daerah.

Anggota Komisi D DPRD Sleman Fika Chusnul Chotimah SH mengatakan, pada APBD murni 2023 ini, pemerintah daerah baru menganggarkan Rp 12,5 miliar. Namun karena banyaknya masyarakat yang mengakses program tersebut, dikhawatirkan anggaran tersebut tidak mencukupi sampai akhir tahun.

"Kalau dilihat banyaknya masyarakat yang mengakses, menunjukkan bahwa program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial," kata Fika di kantornya, Kamis (24/8).

Politisi dari PPP ini melihat, dalam Rancangan APBD Perubahan 2023 ini belum ada tambahan anggaran untuk JPS. Dirinya menilai perlu adanya penambahan alokasi JPS sebesar Rp 2,5 miliar. Mengingat idealnya alokasi JPS di Sleman itu minimal Rp 15 miliar setiap tahunnya. "Kami rasa alokasi JPS ini perlu ditambah. Kalau anggarannya terbatas, mungkin anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, dapat dialihkan ke program JPS," ucapnya.

Fika juga akan memperjuangkan pada APBD 2024 mendatang alokasi program JPS meningkat dari tahun ini. Paling tidak tahun depan bertambah Rp 5 miliar untuk program JPS. "Kami selaku Komisi D yang membidangi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, akan memperjuangkan agar program JPS terus meningkat setiap tahunnya," ujarnya.

Fika juga menyoroti soal pencairan program JPS bidang pendidikan. Selama ini pencairannya cukup lama, padahal bantuan itu sangat dibutuhkan masyarakat untuk membayar tunggakan sekolah. "Untuk pencairan bantuan kesehatan sudah cepat dan bagus. Tapi untuk bantuan pendidikan masih kurang. Ini yang sering menjadi keluhan masyarakat. Kami berharap ini dapat dipercepat lagi," pintanya. **(Sni)-f**

MENGHADAPI PEMILU 2024

Kodim Bantul Jaga Netralisasi TNI

BANTUL (KR) - Dandim 0729 Bantul Letkol Inf Arif Hermad SIP menekankan semua prajurit jajaran Kodim 0729 Bantul, untuk menjaga netralisasi TNI pada Pemilu 2024. Kepada wartawan Kamis (24/8), Dandim mengatakan, saat ini sudah memasuki tahun politik dan beberapa bulan lagi diselenggarakan Pemilu 2024, karena itu TNI harus benar-benar berlaku netral, tidak memihak kepada partai apapun. "Kami tugasnya memback up Polisi untuk pengamanan terselenggarakan Pemilu agar berjalan kondusif dan sukses," paparnya.

Ditegaskan, ada lima perintah Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang wajib ditaati prajurit TNI di Pemilihan Umum 2024. Yakni, tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada Partai Politik manapun beserta Paslon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

Tidak memberikan fasilitas tempat/sarana dan prasarana milik TNI kepada Paslon dan Parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye. Keluarga Prajurit TNI yang memiliki hak pilih (Hak individu selaku Warga Negara), dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih. Tidak memberikan tanggapan, komentar dan mengupload apapun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh Lembaga Survey.

Menindak tegas Prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak dan memberi dukungan Partai Politik beserta Paslon yang diusung. "Netralitas TNI merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Amanah tersebut agar dapat dipahami, dipedomani, dan dilaksanakan oleh seluruh prajurit TNI," imbuhnya.

Karena itu anggota Kodim 0729 Bantul dilarang memberi komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahan apapun berkaitan dengan kontestan Pemilu kepada keluarga atau masyarakat, secara perorangan atau fasilitas berada di arena tempat penyelenggaraan Pemilu. Juga dilarang menyimpan dan menempel dokumen, atribut, benda lain yang menggambarkan identitas peserta Pemilu di instansi dan peralatan milik TNI. Hingga dilarang berada di arena Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pelaksanaan pemungutan suara. **(Jdm)-f**

DINAS KOPERASI UKM DIY

Tingkatkan Kapasitas Olahan Bebek Nglengis

KR - Istimewa

Para peserta pelatihan usaha kuliner olahan bebek di Banyurejo, Tempel, Sleman.

SLEMAN (KR) - Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman dikenal sebagai sentra kuliner bebek Nglengis. Selama tiga generasi, wilayah Dusun Nglengis merupakan sentra kuliner bebek bacem yang sangat terkenal. Dituturkan Kepala Kalurahan Banyurejo, Saparjo ST, olahan bebek bacem di Nglengis adalah kuliner unggulan yang sudah dijalankan turun-temurun dan olahannya belum memiliki varian lain.

Untuk itu, Dinas Koperasi UKM DIY berupaya merevitalisasi olahan kuliner bebek di Banyurejo dengan skema baru. Skema baru ini tidak terlepas dari pembinaan desa prener yang diintensifkan di Banyurejo, dengan pendekatan Blangkon. Sebuah skema pembinaan yang bermuatan lokal, berorientasi global dan berbasis komunal. Maka, revitalisasi kuliner bebek di Nglengis diarahkan pada pengembangan menu baru.

Melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Rintisan Desa Mandiri Budaya yang berasal dari dana keistimewaan tahun 2023, dilakukan pelatihan kepada 50 pelaku usaha kuliner olahan bebek yang ada di Banyurejo. Dinas Koperasi UKM DIY sebagai pendamping dan pembina pelaksanaan BKK Kelurahan Banyurejo bersama konseptor Blangkon, yakni Imam Syafii, berupaya melakukan pendampingan tersebut. Pendampingan berupa pengenalan menu baru olahan bebek yang inovatif ini dikenalkan selama tiga hari, dengan menghadirkan profesional atau Chef Erwan Sakti. Chef Erwan Sakti adalah ahli kuliner profesional bersertifikat yang memberikan banyak hal baru tentang olahan kuliner bebek.

Selama tiga hari yakni 21-23 Agustus 2023, pelaku usaha kuliner bebek mengikuti pelatihan ini dengan serius dan sangat intens di balai Kalurahan Banyurejo. Bahkan kegiatan yang diselenggarakan hingga sore pada setiap harinya itu, diikuti dengan banyak pertanyaan tentang menu baru olahan bebek. Diantaranya fillet bebek, bebek peking dan abon bebek.

KR - Istimewa

Suasana pelatihan usaha kuliner olahan bebek

Menurut salah seorang peserta dari Dusun Nglengis, acara yang diselenggarakan Dinas Koperasi UKM DIY kali ini, benar-benar membuat banyak pelaku usaha sangat antusias. "Materi ini benar-benar membuka wawasan bagi banyak pelaku usaha olahan kuliner bebek disini," ungkapnya.

Mewakili Kadiskop UKM DIY, Kepala Bidang Kewirausahaan Dinas Koperasi UKM DIY, Wisnu Hermawan, menyatakan bahwa Banyurejo dipilih menjadi kalurahan Prener dengan pertimbangan bahwa wilayah ini pada masa mendatang akan menjadi strategis karena menjadi jalur jalan tol. "Masyarakat Banyurejo harus bersiap dalam menghadapi perubahan baik fisik maupun non-fisik, termasuk menyongsong pengembangan sentra UMKM pada fasilitas umum yang menyertai pembangunan jalan tol," paparnya. "Pelatihan ini adalah bagian dari desain besar dalam pemberdayaan masyarakat terdampak jalan tol untuk bersiap menyambut perubahan," sambung Wisnu.

Tahun 2023 ini, selain pelatihan yang fokus pada produk olahan bebek, juga dilakukan revitalisasi dapur-dapur pada pelaku usaha kuliner bebek yang ada di Kelurahan Banyurejo. Harapannya, dengan penataan sentra produksi olahan kuliner bebek yang layak, akan membawa tingkat keyakinan konsumen bahwa produksi dilakukan dengan spirit kualitas dan keamanan pangan. "Bahkan, nantinya Diskop UKM DIY akan menggandeng Badan POM, Dinkes setempat, BPJPH dan instansi lainnya, dalam rangka membantu mengembangkan kuliner olahan bebek di Kelurahan Banyurejo dalam koridor pembinaan desa prener," tutupnya. **(Sal)**